

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat capaian pembangunan Sumber Daya Manusianya, pendidikan menjadi domain utama bagi setiap Negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Setiap Negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali, Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Indonesia. Visi Pendidikan Nasional adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala tantangan zaman yang semakin berubah.

Langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah dalam mewujudkan visi pendidikan nasional antara lain: 1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, 2) meningkatkan mutu pendidikan yang mempunyai daya saing tingkat nasional, regional maupun internasional, 3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan

kebutuhan masyarakat dan tantangan global, 4) meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan, 5) mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat terpencil, daerah-daerah konflik ataupun masyarakat penyandang cacat. Salah satu alasan adalah rendahnya partisipasi pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Biaya langsung antara lain iuran sekolah, buku, seragam dan alat-alat tulis. Sementara biaya tidak langsung meliputi biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya-biaya lain.

Kenaikan harga BBM sejak tanggal 1 maret 2005 telah berdampak pada semakin menurunnya kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut lebih lanjut akan menghambat upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun karena penduduk miskin semakin sulit memenuhi biaya pendidikan. Meskipun demikian pemerintah terus melakukan upaya penanganan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan adalah program pemerintah guna meningkatkan perluasan dan

pemerataan pendidikan terutama dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dengan adanya PKPS-BBM pada tahun 2005, pemerintah memprogramkan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan sekolah agama (islam dan non-islam) yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Program Bantuan Operasional sekolah (BOS) sejak juli 2005 telah memperkecil hambatan terbesar penyelenggaraan pendidikan dasar, yaitu besarnya biaya yang harus ditanggung oleh orang tua peserta didik dan memberikan subsidi kebutuhan belanja sekolah/madrasah kepada semua SD/MI serta SMP/MTs (negeri dan swasta), sehingga biaya pendidikan secara keseluruhan berkurang.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bukan hanya berorientasi pada pengurangan biaya Pendidikan, tetapi juga dalam upaya meningkatkan kinerja sekolah/madrasah dan dikaitkan juga dengan jenis program yang didanainya. Dengan menghubungkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan program sekolah /madrasah, maka bisa diketahui sejauhmana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk membiayai program-program yang memang dibutuhkan oleh sekolah/madrasah untuk meningkatkan kinerjanya.

Melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) peserta didik tingkat pendidikan dasar akan dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah dan biaya nonpersonalia. Biaya nonpersonalia adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan

berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009). Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal Pendidikan Dasar di kabupaten/kota menetapkan 13 indikator yang harus dipenuhi ditingkat sekolah/madrasah, terkait dengan buku dan media pembelajaran, kurikulum dan rencana pembelajaran, proses pembelajaran, evaluasi Pendidikan dan manajemen sekolah/madrasah.

Sekolah sebagai entitas organisasi harus mampu mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara professional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah di SDN 4 Suwawa Selatan, dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat membantu siswa diantaranya; kehadiran siswa meningkat, disiplin siswa sudah ada dan dalam biaya praktek sudah tidak ada pungutan bagi siswa. Namun yang menjadi permasalahan adalah orang tua siswa tidak ada partisipasi lagi dalam mendukung program atau kegiatan yang ada disekolah, seperti pemagaran sekitar sekolah. Permasalahan lain besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah belum dapat membantu program atau kegiatan yang ada di sekolah. Hal ini disebabkan oleh jumlah peserta didik yang ada disekolah tersebut sedikit yakni sebanyak 104 orang dan terlambatnya penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga menghambat program atau kegiatan yang telah direncanakan.

Dari uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Suwawa”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Suwawa?
2. Bagaimana pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Suwawa?
3. Bagaimana hasil pelaksanaan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Suwawa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui program-program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Suwawa.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Suwawa.
3. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Suwawa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Kepala Sekolah, dengan adanya penelitian ini merupakan salah satu bahan perbandingan dan referensi didalam pelaksanaan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
2. Bagi Guru, dapat mengetahui kegiatan apa saja yang dianggarkan dalam dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
3. Siswa, menjadi referensi dan menambah pengetahuan dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Operasional sekolah (BOS).
4. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini penulis akan memperoleh wawasan yang lebih luas terhadap permasalahan secara ilmiah.